

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana manajemen krisis Universitas Andalas pada kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium berdasarkan teori *image repair* oleh Benoit. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manajemen krisis Universitas Andalas dalam menghadapi isu dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium sentral dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kasus. Pada tahap awal, universitas lebih berfokus pada konsolidasi internal, audit oleh SPI, dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Komunikasi publik baru dilaksanakan setelah isu berkembang luas dan memunculkan polemik mengenai kebebasan pers mahasiswa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarunit organisasi dan ketepatan waktu penyampaian informasi masih perlu dioptimalkan agar universitas dapat lebih proaktif dalam mengelola krisis.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Universitas Andalas menggunakan tiga strategi *image repair* dalam merespons krisis dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium sentral, yaitu *corrective action*, *reducing offensiveness (bolstering & minimization)* dan, *mortification*, yang dijalankan secara bertahap mengikuti eskalasi krisis dan bukan sebagai bagian dari rencana komunikasi yang terstruktur sejak awal. Keempat strategi tersebut menunjukkan satu

pola yang konsisten, yakni moderasi strategi, di mana setiap strategi dijalankan dalam bentuk yang terkontrol dan terkalkulasi untuk meminimalkan risiko hukum sekaligus menjaga stabilitas reputasi kelembagaan. *Corrective action* dilakukan lebih dahulu secara internal melalui audit oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan konsolidasi organisas, namun tidak segera dikomunikasikan kepada publik sehingga universitas kehilangan momentum untuk membangun narasi institusi sejak awal. *Bolstering* dijalankan secara konsisten melalui penekanan nilai supremasi hukum dan asas praduga tak bersalah.

Strategi *minimization* dan *mortification* yang digunakan Universitas Andalas beroperasi secara bersamaan dan saling membentuk dalam satu konfigurasi yang terintegrasi. Insiden penghubungan redaksi Genta Andalas yang dipersepsikan publik sebagai “intimidasi” dibingkai ulang melalui *minimization* sebagai “miskomunikasi”, sementara permintaan maaf yang kemudian disampaikan melalui *mortification* menggunakan framing yang sama, sehingga menghasilkan bentuk pengakuan yang secara strategis aman namun secara persuasif tidak mencapai potensi pemulihan citra. Secara keseluruhan, konfigurasi *image repair* yang dipilih Universitas Andalas mencerminkan pendekatan manajemen krisis yang lebih mengutamakan keselamatan hukum dan stabilitas institusional daripada pemulihan citra publik secara maksimal, sebuah pilihan yang dapat dipahami dalam konteks sensitivitas kasus hukum pidana, namun sekaligus membatasi ruang gerak organisasi dalam upaya komunikasi krisis yang dijalankan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini menggunakan teori *image repair* Benoit sebagai kerangka analisis tunggal dalam membaca strategi komunikasi krisis Universitas Andalas. Penelitian selanjutnya dapat memperkaya analisis dengan mengintegrasikan teori lain yang relevan atau meneliti efektivitas strategi yang digunakan secara kuantitatif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan subjek dengan melibatkan perspektif pihak-pihak yang tidak terwakili dalam penelitian ini, seperti mahasiswa umum, alumni, dan mitra kelembagaan Universitas Andalas, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang persepsi publik mengenai strategi *image repair* yang dijalankan.

5.2.2 Saran Praktis

Bagi Universitas Andalas dan institusi pendidikan tinggi lainnya yang menghadapi situasi krisis yang serupa, penelitian ini memberikan beberapa catatan praktis yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya dalam konteks Indonesia di mana proses hukum pidana membawa implikasi reputasional yang sangat besar bagi institusi terutama institusi pendidikan, universitas perlu mengembangkan protokol komunikasi krisis yang secara eksplisit mengatur batas-batas antara kepentingan hukum dan kepentingan publik, sehingga kedua kepentingan tersebut dapat dijalankan secara sinergis dan bukan sebagai dua hal yang saling mengorbankan.